

**PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH SEKTOR  
PENDIDIKAN DAN SEKTOR KESEHATAN TERHADAP  
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI JAWA TIMUR  
TAHUN 2010-2019**

**Skripsi**

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat**

**Sarjana Ekonomi**

**Pada Program Studi Ekonomi Pembangunan**

**Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



**Disusun Oleh:**

**Yohanes Pratama Dharma Setyawan**

**NPM: 16 11 22605**

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA  
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA  
YOGYAKARTA,  
DESEMBER 2020**

**Skripsi**

**PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH SEKTOR PENDIDIKAN  
DAN SEKTOR KESEHATAN TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN  
MANUSIA DI JAWA TIMUR TAHUN 2010-2019**



**Disusun Oleh:**

**Yohanes Pratama Dharma Setyawan**

**NPM: 16 11 22605**

**Telah dibaca dan disetujui oleh**

**Pembimbing**

**D. Sriyono, Drs., M.Si**

**14 Oktober 2020**



**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**  
Fakultas Bisnis dan Ekonomika

**SURAT KETERANGAN**

No. 039/J/1

Berdasarkan dari Ujian Pendadaran yang diselenggarakan pada hari Jumat, 6 November 2020 dengan susunan penguji sebagai berikut:

- |                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| 1. Dr. Y. Sri Susilo, M.Si.    | (Ketua Penguji) |
| 2. Ag. Edi Sutarta, SE., M.Si. | (Anggota)       |
| 3. Drs. D. Sriyono, M.Si.      | (Anggota)       |

Tim Penguji Pendadaran Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atma Jaya Yogyakarta telah memutuskan bahwa:

Nama : Yohanes Pratama Dharma Setyawan  
NPM : 161122605

Dinyatakan  
Lulus Dengan Revisi

Pada saat ini skripsi Yohanes Pratama Dharma Setyawan telah selesai direvisi dan revisian tersebut telah diperiksa dan disetujui oleh semua anggota panitia penguji. Surat Keterangan ini dibuat agar dapat digunakan untuk keperluan Yudisium kelulusan Sarjana Ekonomi Fakultas Bisnis dan Ekonomika UAJY.

Dekan,

  
**Dekan Betti Suprpto, MBA., Ph.D.**  
Fakultas Bisnis dan Ekonomika

**PERNYATAAN**

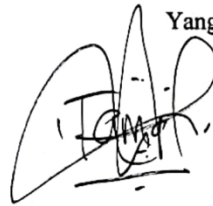
Saya yang bertanda tangan dibawah ini dengan sesungguhnya menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH SEKTOR PENDIDIKAN  
DAN SEKTOR KESEHATAN TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN  
MANUSIA DI JAWA TIMUR TAHUN 2010-2019**

benar-benar hasil karya saya sendiri. Pernyataan, ide, maupun kutipan baik langsung maupun tak langsung yang bersumber dari tulisan atau ide orang lain dinyatakan secara tertulis dalam skripsi ini dalam catatan perut dan daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa saya melakukan plagiasi sebagian atau seluruhnya dari skripsi ini, maka gelar dan ijazah yang saya peroleh dinyatakan batal dan akan saya kembalikan kepada Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Yogyakarta, 31 Desember 2020

Yang menyatakan



**Yohanes Pratama Dharma Setyawan**

## KATA PENGANTAR

Sebuah Anugerah yang besar dan indah sehingga sepantasnya penulis ucapkan puja dan puji syukur kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Karena atas berkat, perlindungan serta kasihnya selama proses penyusunan skripsi ini sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas penyusunan skripsi yang berjudul “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Sektor Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Timur Tahun 2010-2019”, sebagai tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai derajat Sarjana (S1) pada Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa banyak pihak yang ikut serta memberi dukungan dan bantuan dalam penyusunan skripsi ini. Maka dari itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak D. Sriyono, Drs., M.Si selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang selalu memberikan arahan dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih banyak penulis ucapkan.
2. Ibu Yenny Patnasari, SE., M.Si. selaku dosen penguji kolokium skripsi penulis. Terima kasih atas saran dan masukan yang sangat berguna bagi penulisan skripsi ini
3. Bapak Dr. Y. Sri Susilo SE., M.Si. dan Bapak Edi Sutarta A., SE., M.Si. selaku dosen penguji skripsi penulis. Terima kasih untuk setiap

saran, kritik dan kesabaran yang sangat bermanfaat bagi penulisan skripsi ini.

4. Bapak dan Mama penulis yang terus menerus mendoakan, memarahi untuk memacu semangat, memberikan kasih sayang tulus, serta memberikan masukan dan nasehat selama proses perkuliahan sampai terselesaikan skripsi ini. Terima kasih tak terhingga penulis ucapkan.
5. Bapak dan ibu dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan FBE UAJY yang ramah dan mencintai seluruh mahasiswi dan mahasiswa prodi Ekonomi Pembangunan.
6. Teman-teman Ekonomi Pembangunan FBE UAJY angkatan 2016 yang selalu membantu satu sama lain.
7. Bolang FC, dimana sangat membantu dengan kebahagiaan yang kalian tularkan sehingga dapat meringankan beban penulis. Bahagia selalu dimana kalian berada.
8. Teman-teman satu bimbingan skripsi, Berti, Indah, Jon, Widi, Tyas yang selalu saling memberikan semangat dan bantuan.
9. Keluarga besar HMPSEP yang juga selalu memberikan semangat.
10. Pihak-pihak lain yang turut serta membantu penulis dalam mengerjakan skripsi yang tidak dapat disebutkan satu persatu di sini.

Semoga penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat bagi banyak pihak.

Yogyakarta, 31 Desember 2020

Yohanes Pratama Dharma Setyawan

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan dengan kasih dan sukacita bagi:

**Tuhan Yesus Kristus**

**Bapak**

**Mama**

**Seluruh Keluarga Besar**

**Sahabat dan teman-temanku dimanapun kalian berada**

**Motto**

***“Kawula Mung Saderma, Mobah Mosik Kersaning Hyang Sukma”***

**unknown**

***“Ecce Ancilla Domini, Fiat Mihi Secundum Verbum Tuum”***

**Lukas 1:38**

***“Wherever we want to go, we’ll go!”***

**Captain Jack Sparrow**

***“You’ll Never Walk Alone”***

**Liverpool FC**

## DAFTAR ISI

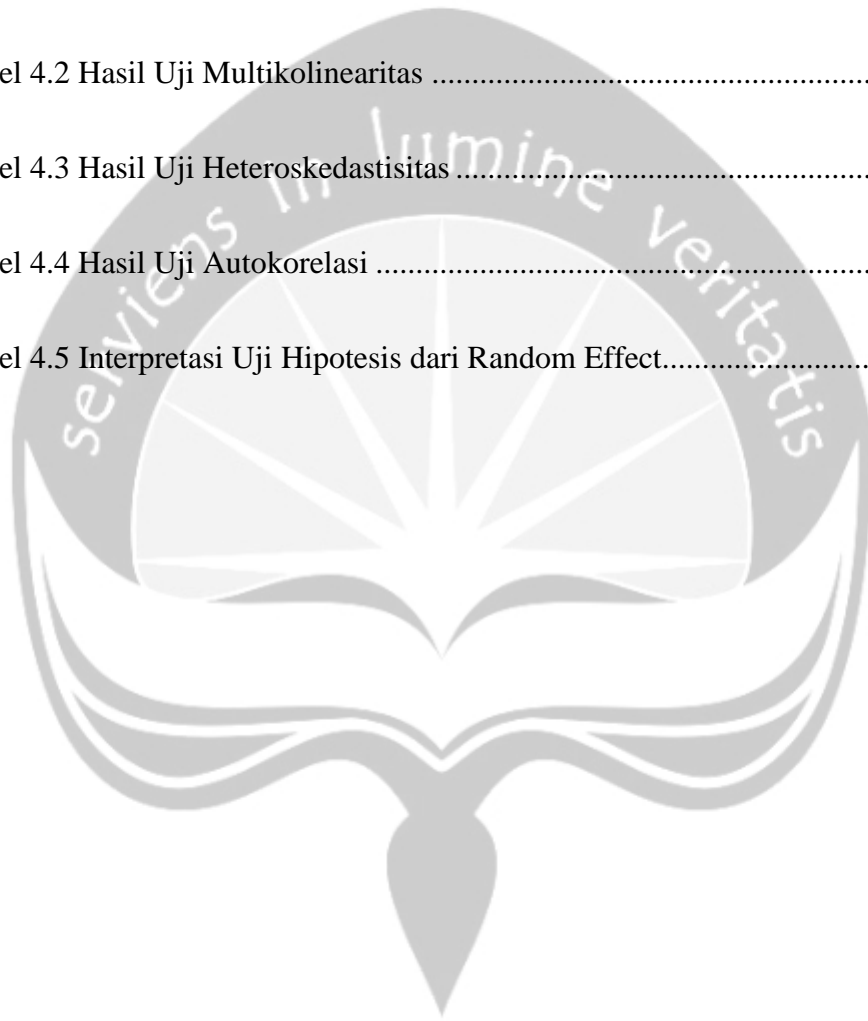
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAKSI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>3</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	3
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	9
1.4 Hipotesis.....	9
1.5 Manfaat Penelitian .....	9
1.6 Sistematika Penelitian .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
2.1 Teori Ekonomi Pembangunan.....	11
2.2 Pembangunan Manusia .....	12
2.3 Teori Pengeluaran Pemerintah .....	12
2.4 Hubungan Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia .....	15



2.5 Hubungan Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia .....	17
2.6 Penelitian Terdahulu .....	18
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>23</b>
3.1 Data dan Sumber Data .....	23
3.2 Model Penelitian .....	23
3.3 Alat Analisis.....	24
3.3.1 Ekonometrika Data Panel.....	24
3.3.2 Pemilihan Model Estimasi .....	27
3.3.3 Uji Asumsi Klasik .....	31
3.3.4 Koefisien Determinasi, Uji F dan Uji t.....	33
3.4 Definisi Operasional.....	35
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>38</b>
4.1. Hasil Penelitian .....	38
4.1.1 Deskripsi Hasil Penelitian .....	38
4.1.2 Pemilihan Model Estimasi .....	40
4.1.3 Uji Asumsi Klasik.....	42
4.1.4 Pengujian Hipotesis dan Koefisien Determinasi.....	43
4.1.5 Interpretasi Ekonomi.....	48
4.2. Pembahasan.....	50
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>54</b>
5.1. Kesimpulan .....	54
5.2. Saran.....	55
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>56</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>60</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Peringkat Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi .....	2
Tabel 4.1 Hasil Uji Normalitas .....	41
Tabel 4.2 Hasil Uji Multikolinearitas .....	41
Tabel 4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	42
Tabel 4.4 Hasil Uji Autokorelasi .....	43
Tabel 4.5 Interpretasi Uji Hipotesis dari Random Effect.....	44



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Timur Menurut Kabupaten/Kota 2019.....	7
--	---



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Data Penelitian.....	57
Lampiran 2	Hasil Uji Normalitas.....	67
Lampiran 3	Hasil Uji Multikolinearitas .....	68
Lampiran 4	Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	69
Lampiran 5	Hasil Uji Autokorelasi.....	70
Lampiran 6	Hasil Output Pemilihan Model Panel .....	71
Lampiran 7	Hasil Output Pemilihan Model Panel .....	72
Lampiran 8	Hasil Output Pemilihan Model Panel .....	73
Lampiran 9	Hasil Output Pemilihan Model Panel.....	74
Lampiran 10	Hasil Output Pemilihan Model Panel.....	75

**PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH SEKTOR PENDIDIKAN  
DAN SEKTOR KESEHATAN TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN  
MANUSIA DI JAWA TIMUR TAHUN 2010-2019**

**Disusun Oleh:**

**Yohanes Pratama Dharma Setyawan**

**NPM: 16 11 22605**

**Pembimbing**

**D. Sriyono, Drs., M.Si**

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan pengeluaran pemerintah sektor kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di Jawa Timur tahun 2010-2019. Jenis data dari penelitian ini adalah data sekunder. Sumber data dalam penelitian ini berupa data tahunan pengeluaran pemerintah berdasarkan fungsi pendidikan dan kesehatan, serta indeks pembangunan manusia yang diambil di Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) sebanyak 38 di Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2019.

Teknik analisis data menggunakan metode analisis ekonometrika yaitu analisis regresi data panel dengan program Eviews 9.0 untuk pengujian asumsi klasik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan pengeluaran pemerintah sektor kesehatan terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Jawa Timur tahun 2010-2019.

**Kata kunci:** sektor pendidikan, sektor kesehatan, dan indeks pembangunan manusia, Jawa Timur

**SECTOR EDUCATION INFLUENCE OF GOVERNMENT AND HEALTH  
SECTOR EXPENDITURE ON HUMAN DEVELOPMENT INDEX  
IN EAST JAVA, 2010-2019**

**By:**  
**Yohanes Pratama Dharma Setyawan**  
**NPM: 16 11 22605**

**Lecturer**  
**D. Sriyono, Drs., M. Si**

**Abstract**

*This study aims to determine and analyze the effect of government spending on the education sector and effect of government spending on the health sector on the human development index in East Java in 2010-2019. The type of data from this research is secondary data. Sources of data in this study are annual data on government expenditures based on education and health functions, as well as human development indexes taken at the Central Statistics Agency (BPS) and the Directorate General of Fiscal Balance (DJPB) as many as 38 districts / cities in East Java Province. 2010-2019.*

*The data analysis technique used the econometric analysis method, namely panel data regression analysis with the Eviews 9.0 program for testing classical assumptions. The results of this study indicate that: government spending in the education sector and government spending in the health sector has a positive effect on the human development index in East Java 2010-2019.*

**Keywords:** *education sector, health sector, and human development index, East Java*

## BAB I

### PENDAHULUAN

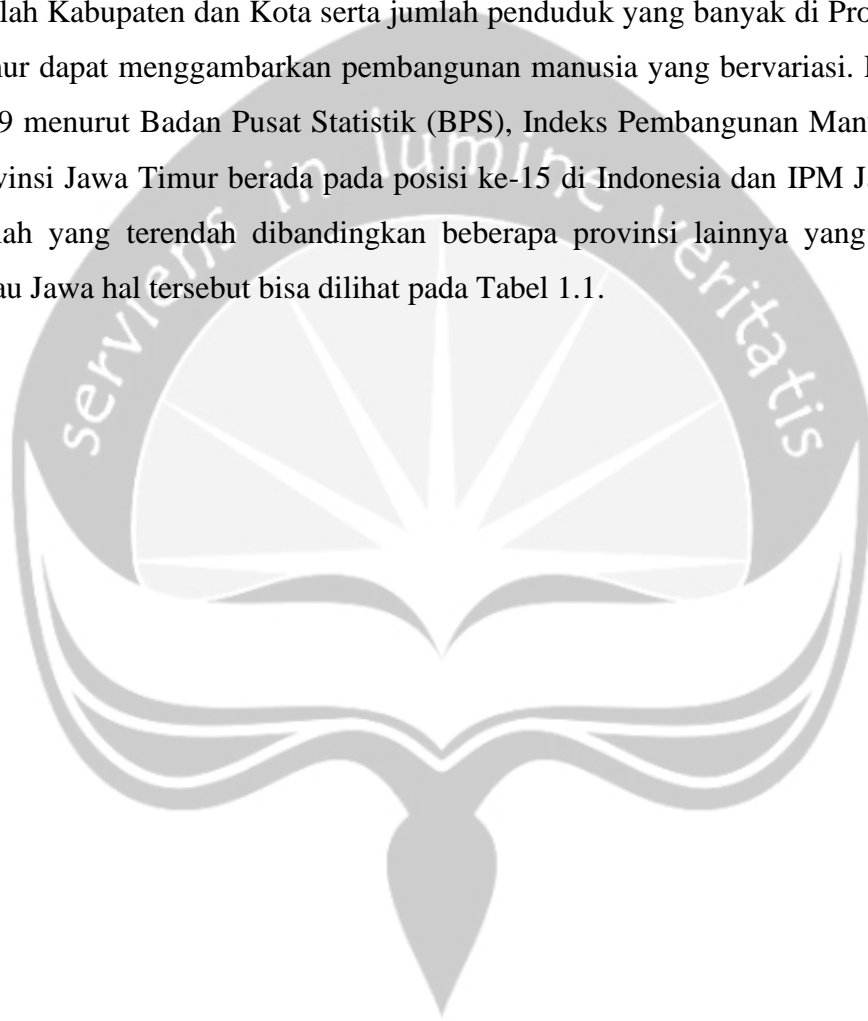
#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Dewasa ini Indonesia ingin terus meningkatkan pembangunan ekonomi, salah satu cara yang dilakukan adalah dengan menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul. Ketika membahas program pembangunan, manusia merupakan aspek penting. Negara yang mempunyai sumber daya manusia yang berkompeten dalam arti lain juga berkualitas akan memperlancar proses pembangunan perekonomian dalam rangka mewujudkan kesejahteraan. Pembangunan suatu negara belum bisa dikatakan berhasil apabila dilihat hanya dari besarnya pendapatan domestik bruto tanpa adanya upaya peningkatan pembangunan manusianya, maka dari itu pembangunan manusia adalah salah satu indikator dalam mengukur kemajuan suatu negara. Menurut Arifin *et.al.*, (2015) terdapat berbagai cara yang bisa digunakan dalam mengukur keberhasilan pembangunan manusia suatu negara, salah satunya adalah mengukur keberhasilan pembangunan manusia dengan menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990.

Perbaikan modal manusia adalah salah satu langkah yang dapat diambil dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Modal manusia dapat mengacu pada pendidikan, namun juga digunakan untuk menjelaskan jenis investasi manusia lainnya, yaitu investasi yang mendorong ke arah populasi yang sehat yaitu kesehatan. Menurut Todaro (2003) tujuan pembangunan paling mendasar adalah pendidikan dan kesehatan. Pendidikan merupakan sesuatu yang pokok untuk memperoleh kehidupan yang berharga serta memuaskan, sedangkan kesehatan sama dengan kesejahteraan, keduanya merupakan hal yang penting

untuk membentuk kapabilitas manusia yang lebih luas yang berada pada inti makna pembangunan.

Jawa Timur sendiri adalah salah satu provinsi yang ada di Indonesia. Menurut data yang diumumkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Provinsi Jawa Timur terdiri atas 9 Kota dan 29 Kabupaten. Dengan jumlah Kabupaten dan Kota serta jumlah penduduk yang banyak di Provinsi Jawa Timur dapat menggambarkan pembangunan manusia yang bervariasi. Pada tahun 2019 menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) provinsi Jawa Timur berada pada posisi ke-15 di Indonesia dan IPM Jawa Timur adalah yang terendah dibandingkan beberapa provinsi lainnya yang berada di Pulau Jawa hal tersebut bisa dilihat pada Tabel 1.1.





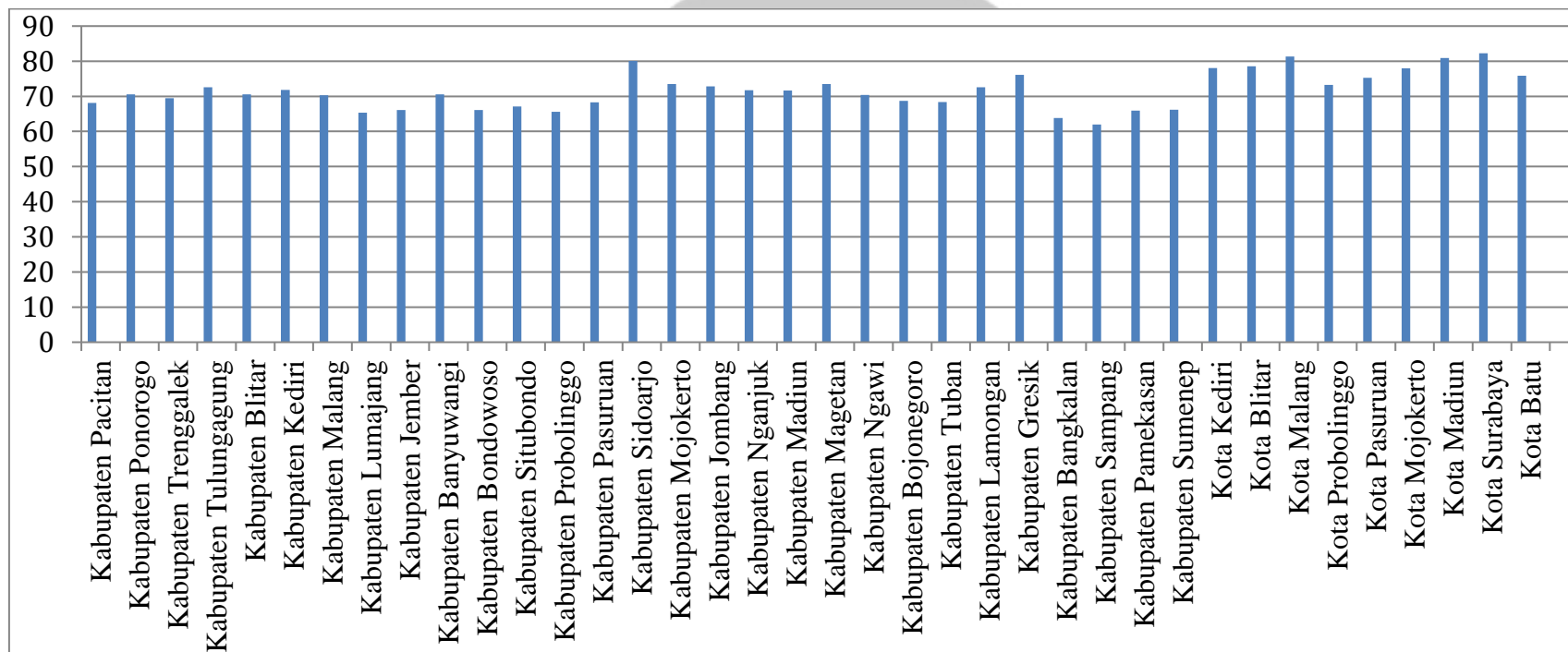
**Tabel 1.1**  
**Peringkat Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi**

Provinsi / Kabupaten / Kota	[Metode Baru] Peringkat Indeks Pembangunan Manusia							
	2010	2011	2012	2013	2014	2017	2018	2019
ACEH	10	10	10	11	11	11	11	11
SUMATERA UTARA	11	11	11	10	10	12	12	12
SUMATERA BARAT	9	9	9	9	9	9	9	9
RIAU	6	6	6	6	6	6	6	6
JAMBI	18	18	17	17	17	16	17	17
SUMATERA SELATAN	22	22	22	23	23	23	23	23
BENGKULU	20	20	21	20	20	18	18	18
LAMPUNG	24	25	25	26	26	24	24	24
KEP. BANGKA BELITUNG	14	15	14	16	16	16	16	16
KEP. RIAU	4	4	4	4	4	4	4	4
DKI JAKARTA	1	1	1	1	1	1	1	1
JAWA BARAT	12	12	12	12	12	10	10	10
JAWA TENGAH	13	14	15	13	13	13	13	13
DI YOGYAKARTA	2	2	2	2	2	2	2	2
<b>JAWA TIMUR</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
BANTEN	8	8	8	8	8	8	8	8
BALI	5	5	5	5	5	5	5	5
NUSA TENGGARA BARAT	29	29	29	30	30	29	29	29
NUSA TENGGARA TIMUR	32	31	31	31	31	32	32	32
KALIMANTAN BARAT	28	28	28	29	29	30	30	30
KALIMANTAN TENGAH	17	17	20	21	21	21	21	21
KALIMANTAN SELATAN	21	21	19	22	22	22	22	22
KALIMANTAN TIMUR	3	3	3	3	3	3	3	3
KALIMANTAN UTARA	0	0	0	14	14	20	20	20
SULAWESI UTARA	7	7	7	7	7	7	7	7
SULAWESI TENGAH	25	24	24	25	25	26	25	25
SULAWESI SELATAN	15	13	13	15	15	14	14	14
SULAWESI TENGGARA	16	16	16	19	19	19	19	19
GORONTALO	27	26	26	28	28	28	28	28
SULAWESI BARAT	30	30	30	32	32	31	31	31
MALUKU	23	23	23	24	24	25	26	26
MALUKU UTARA	26	27	27	27	27	27	27	27
PAPUA BARAT	31	32	32	33	33	33	33	33
PAPUA	33	33	33	34	34	34	34	34

Sumber: Badan Pusat Statistik (2019).

Pada tahun 2019 pembangunan manusia di Jawa Timur terus mengalami peningkatan. IPM Jawa Timur pada tahun 2018 mencapai 70,77 dan pada tahun 2019 mencapai 71,50 atau naik 1,03 persen. IPM di Surabaya adalah yang tertinggi di Jawa Timur sebesar 82,22 sedangkan di Sampang adalah yang terendah di Jawa Timur sebesar 61,94. Hal tersebut menunjukkan bahwa belum meratanya pembangunan di provinsi Jawa Timur. Gambar 1.1 akan menunjukkan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Timur.





Gambar 1.1

**Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Timur Menurut Kabupaten/Kota 2019**

Sumber: Badan Pusat Statistik (2020)

Untuk meningkatkan perekonomian negara maka pemerintah harus dapat mengalokasikan belanja daerah melalui pengeluaran pembangunan di sektor-sektor pendukung untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia. Setidaknya terdapat dua sektor yang harus diperhatikan oleh pemerintah agar masyarakat dapat sejahtera yaitu sektor pendidikan dan kesehatan. Hal tersebut akan tercapai melalui alokasi pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan.

Dalam penelitian terdahulu, Arifin *et.al.*, (2015) menunjukkan bahwa, pengeluaran pemerintah sektor kesehatan dan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia Jawa Timur tahun 2006-2013. Hal tersebut juga didukung oleh penelitian Dianaputra dan Aswitari (2017) yang menemukan bahwa pembiayaan pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks kualitas manusia di Provinsi Bali. Akan tetapi pada penelitian yang lebih luas, Hakim dan Sukmana (2017) menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di 16 Negara OKI.

Berdasarkan latar belakang diatas, kiranya penting untuk mengetahui bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan sektor kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di Jawa Timur tahun 2010-2019.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan dalam bagian latar belakang, maka rumusan masalah yang telah di susun dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimanakah pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan terhadap indeks pembangunan manusia di Jawa Timur tahun 2010-2019?
- 2) Bagaimanakah pengaruh pengeluaran pemerintah sektor kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di Jawa Timur tahun 2010-2019?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah:

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan terhadap indeks pembangunan manusia di Jawa Timur tahun 2010-2019.
- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah sektor kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di Jawa Timur tahun 2010-2019.

### **1.4 Hipotesis**

Berdasarkan rumusan masalah yang dibuat, maka diperoleh hipotesis sebagai berikut:

- 1) Diduga pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Jawa Timur tahun 2010-2019.
- 2) Diduga pengeluaran pemerintah sektor kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Jawa Timur tahun 2010-2019.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk:

- 1) Pemerintah, sebagai salah satu bahan referensi dalam menerapkan kebijakan.
- 2) Peneliti / Pembaca, sebagai bahan referensi dan pembanding studi / penelitian yang terkait dengan riset ini.

## **1.6 Sistematika Penelitian**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dibuat dan terbagi menjadi lima bab dengan rincian sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, hipotesis, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi mengenai teori-teori yang berkaitan dengan judul penelitian dan penelitian terdahulu.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini memberikan uraian mengenai pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian, variabel penelitian, definisi operasional variabel, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, model serta teknik analisis data.

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan tentang analisa data, hasil penelitian yang diperoleh, pengujian hipotesis, dan interpretasi pembahasan sesuai dengan cakupan atau ruang lingkup fokus penelitian.

### **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Teori Ekonomi Pembangunan**

Menurut Todaro (2011) studi ekonomi pembangunan merupakan salah satu cabang ilmu ekonomi dan ekonomi politik yang paling baru, paling menyenangkan dan paling menantang. Dari sudut pandang ilmu ekonomi, pembangunan biasa diartikan sebagai upaya mencapai tingkat pertumbuhan pendapatan per kapita yang berkelanjutan agar negara dapat memperbanyak output yang lebih cepat dibandingkan laju pertumbuhan penduduk. Ilmu ekonomi pembangunan (*development economics*) memiliki cakupan yang luas, selain itu juga merupakan studi tentang upaya mentransformasi perekonomian dari keadaan stagnan ke pertumbuhan, dan dari status penghasilan rendah ke penghasilan tinggi, serta upaya menanggulangi masalah kemiskinan absolut. Selain berkaitan dengan pengalokasian sumber daya produktif yang langka secara efisien dan keberlangsungan pertumbuhan sumber daya itu di masa depan, bidang studi ini juga harus berhubungan dengan mekanisme ekonomi, sosial, politik dan lembaga baik publik maupun swasta yang diperlukan untuk menghasilkan peningkatan standar hidup secara cepat dan berskala besar dari kaum miskin di negara-negara berkembang.

## **2.2 Pembangunan Manusia**

Modal manusia yang didalamnya adalah kesehatan, pendidikan dan keterampilan merupakan hal yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia. Seperti diketahui bahwa adanya perbedaan yang besar dalam modal manusia di seluruh dunia ketika membahas Indeks Pembangunan Manusia. Dibandingkan negara-negara maju, kebanyakan negara berkembang tertinggal dalam hal rata-rata tingkat nutrisi, kesehatan dan pendidikan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sendiri adalah Indeks yang mengukur pencapaian pembangunan sosioekonomi suatu negara, yang mengkombinasikan pencapaian di bidang pendidikan, kesehatan, dan pendapatan riil per kapita yang disesuaikan.

Menurut Todaro (2011) salah satu manfaat IPM adalah untuk menunjukkan bahwa suatu negara sesungguhnya dapat berkinerja jauh lebih baik sekalipun tingkat pendapatannya rendah. Sebaliknya, tingkat pendapatan yang tinggi tidak selamanya diikuti dengan capaian pembangunan manusia yang tinggi pula. IPM mengingatkan kita bahwa pembangunan yang sesungguhnya berarti pembangunan manusia dalam arti luas, bukan sekadar pendapatan yang lebih tinggi. Banyak negara maju yang berpendapatan tinggi, telah dinyatakan mengalami “pertumbuhan tanpa pembangunan”. Kesehatan dan pendidikan adalah input bagi fungsi produksi nasional dalam perannya sebagai komponen modal manusia, yang berarti investasi produktif dalam sumber daya manusia. Peningkatan kesehatan dan pendidikan merupakan tujuan tersendiri yang terpenting dari upaya pembangunan.

## **2.3 Teori Pengeluaran Pemerintah**

### **2.3.1 Teori W.W Rostow dan Musgrave**

Rostow dan Musgrave (Mangkoesebroto dalam Winarti, 2014: 32) menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi, antara lain; tahap awal perkembangan ekonomi, persentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar sebab pada tahap ini



pemerintah harus menyediakan sarana dan prasarana seperti pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan guna memacu pertumbuhan agar dapat lepas landas. Bersamaan dengan itu porsi investasi pihak swasta juga meningkat. Tetap besarnya peranan pemerintah adalah karena pada tahap ini banyak terjadi kegagalan pasar yang ditimbulkan oleh perkembangan ekonomi itu sendiri. Banyak terjadi kasus eksternalitas negatif, misalnya pencemaran lingkungan yang menuntuk pemerintah untuk turun tangan mengatasinya. Menurut Musgrave, proses pembangunan merupakan rasio investasi total terhadap pendapatan nasional semakin besar, tapi rasio investasi pemerintah terhadap pendapatan nasional akan mengecil. Sementara itu Rostow berpendapat bahwa pada tahap lanjut pembangunan terjadi peralihan aktivitas pemerintah, dari penyediaan prasarana ekonomi ke pengeluaran-pengeluaran untuk layanan sosial seperti kesehatan dan pendidikan (Mangkoesobroto dalam Winarti, 2014: 32). Teori perkembangan peranan pemerintah yang dikemukakan oleh Musgrave dan Rostow adalah suatu pandangan yang ditimbulkan dari pengamatan berdasarkan pembangunan ekonomi yang dialami banyak negara, tetapi tidak didasarkan pada suatu teori tertentu.

### **2.3.2 Teori Wagner**

Teori yang menjelaskan perkembangan persentase pengeluaran pemerintah yang semakin besar terhadap *Gross National Product* (GNP). Wagner menyatakan bahwa secara relatif pengeluaran pemerintah akan ikut meningkat ketika pendapatan perkapita meningkat. Penyebab utamanya karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan dan sebagainya (Mangkoesobroto dalam Winarti, 2014: 31).

### 2.3.3 Teori Peacock dan Wiseman

Teori yang berlandaskan pada suatu pandangan dimana masyarakat tidak menyukai untuk membayar pajak yang tinggi, akan tetapi sebaliknya pemerintah terus berusaha memperbesar pengeluarannya dengan penerimaan dari pajak yang menjadi andalannya. Peacock dan Wiseman memberikan pernyataan: masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah (Mangkoesobroto dalam Winarti, 2014: 31).

Pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) yaitu sebuah tindakan pemerintah dengan cara menentukan besarnya pengeluaran dan penerimaan pemerintah setiap tahunnya untuk mengatur jalannya perekonomiannya, yang tergambar dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk nasional dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah/regional. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pengeluaran pemerintah Indonesia secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam dua golongan yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pengeluaran rutin pada dasarnya berunsurkan pos-pos pengeluaran untuk membiayai pelaksanaan roda pemerintahan sehari-hari meliputi belanja pegawai, belanja barang, berbagai macam subsidi (subsidi daerah dan subsidi harga barang), angsuran dan utang pemerintah serta jumlah pengeluaran lain. Sedangkan pengeluaran pembangunan maksudnya adalah pengeluaran yang bersifat menambah modal masyarakat dalam bentuk prasarana fisik, yang dibedakan atas pembangunan yang dibiayai dengan dana rupiah dan bantuan proyek (Patta, 2012: 32).

Menurut Suparmoko yang dikutip oleh Desi dalam (Patta, 2012: 31) bahwa pengeluaran pemerintah dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Pengeluaran itu merupakan investasi yang menambah kekuatan dan ketahanan ekonomi dimasa yang akan datang.
2. Pengeluaran itu langsung memberikan kesejahteraan dan

kegembiraan bagi masyarakat.

3. Merupakan penghematan pengeluaran yang akan datang.
4. Menyediakan kesempatan kerja lebih banyak dan penyebaran tenaga beli yang lebih luas.

## **2.4 Hubungan Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia**

Pendidikan merupakan salah satu tujuan pembangunan yang mendasar, pendidikan bersifat esensial bagi kehidupan yang memuaskan dan berharga serta fundamental kaitannya dengan gagasan lebih luas mengenai peningkatan kapabilitas manusia sebagai inti makna pembangunan yang sesungguhnya. Menurut Todaro (2011) dengan pendapatan yang lebih tinggi maka warga dan pemerintah dapat mengeluarkan dana yang lebih besar untuk kepentingan pendidikan, dan dengan pendidikan yang lebih baik produktivitas dan pendapatan yang lebih tinggi akan mudah tercapai.

Konsep pendidikan sebagai sebuah investasi berkembang secara pesat dan semakin diyakini oleh setiap negara bahwa pembangunan sektor pendidikan merupakan prasyarat kunci bagi pertumbuhan pembangunan sektor lainnya. Pendidikan telah diidentifikasi sebagai faktor kunci dalam pembangunan ekonomi dan sosial, dan kesetaraan akses terhadap pendidikan yang berkualitas telah menjadi tujuan penting dari kebijakan pembangunan. Negara dengan tingkat ketimpangan pendidikan tinggi secara konsisten menunjukkan tingkat inovasi yang lebih rendah, rendahnya tingkat efisiensi produksi, dan kecenderungan untuk mentransmisi kemiskinan lintas generasi (World Bank dalam Winarti, 2014: 11).

Isu mengenai sumber daya manusia (*human capital*) sebagai input pembangunan ekonomi sebenarnya telah dimunculkan oleh Adam Smith pada tahun 1776 yang mencoba menjelaskan penyebab kesejahteraan suatu negara dengan memberikan dua faktor yaitu; pentingnya skala ekonomi dan pembentukan keahlian dan kualitas manusia (Khusaini dalam Syam, 2014: 21).

Pemerintah menempatkan pendidikan sebagai faktor penting dalam menunjang pembangunan nasional. Hal tersebut terlihat dari besarnya pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan. Pemerintah menyediakan APBN untuk bidang pendidikan.

Samoelson dan Nordhaus (1994: 554) Perbaikan mutu pendidikan, orang yang terdidik akan menjadi pekerja yang lebih produktif, karena itu pemerintah harus menginvestasikan dana dalam sekolah dan program pendidikan lainnya untuk mengurangi buta huruf. Selain membaca dan menulis, orang harus dilatih dalam teknik baru di bidang pertanian dan industri. Tingginya pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan akan berpengaruh terhadap perkembangan di sektor pendidikan yaitu dengan meningkatnya jumlah murid yang mampu menyelesaikan sekolahnya sampai ke tingkat yang lebih tinggi. Semakin tinggi rata-rata tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat, maka semakin mudah bagi setiap individu dalam usia bekerja untuk mengerti, menerapkan dan mendapatkan hasil dari kemajuan teknologi dan akhirnya meningkatkan standar ekonomi dan hidup bangsa.

Investasi dalam hal pendidikan mutlak dibutuhkan maka pemerintah harus dapat membangun suatu sarana dan sistem pendidikan yang baik. Alokasi anggaran pengeluaran pemerintah terhadap pendidikan merupakan wujud nyata dari investasi untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. Pengeluaran pembangunan pada sektor pembangunan dapat dialokasikan untuk penyediaan infrastruktur pendidikan dan menyelenggarakan pelayanan pendidikan kepada seluruh penduduk Indonesia secara merata. Anggaran pendidikan di APBN merupakan wujud realisasi pemerintah untuk meningkatkan Pendidikan. Pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan akan berpengaruh terhadap perkembangan di sektor pendidikan yaitu dengan meningkatnya jumlah murid yang mampu menyelesaikan sekolahnya sampai ke tingkat yang lebih tinggi. Semakin tinggi rata-rata tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat, maka semakin mudah bagi setiap individu dalam usia bekerja untuk mengerti, menerapkan dan mendapatkan hasil dari kemajuan teknologi dan

akhirnya meningkatkan standar ekonomi dan hidup bangsa. Suatu bangsa harus meningkatkan investasi bidang pendidikan dan kesehatan untuk mencapai pembangunan (Meier, dalam Winarti, 2014: 41).

## **2.5 Hubungan Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan Terhadap**

### **Indeks Pembangunan Manusia**

Kesehatan adalah salah satu tujuan pembangunan yang mendasar, kesehatan sangat penting artinya bagi kesejahteraan dan fundamental dalam kaitannya dengan gagasan lebih luas mengenai peningkatan kapabilitas manusia sebagai inti makna pembangunan yang sesungguhnya. Kesehatan juga merupakan prasyarat bagi peningkatan produktivitas. Menurut Todaro (2011) dengan pendapatan lebih tinggi maka warga negara dan pemerintah dapat mengeluarkan dana yang lebih besar untuk kepentingan kesehatan dan dengan kesehatan yang lebih baik produktivitas dan pendapatan lebih tinggi akan lebih mudah tercapai.

Tenaga kerja yang sehat secara fisik dan mental akan lebih bersemangat dan lebih produktif dalam menjalankan pekerjaannya. Keadaan seperti ini sering terjadi pada negara-negara sedang berkembang, dimana proporsi terbesar dari angkatan kerja masih melakukan pekerjaannya secara manual. Selanjutnya, anak yang sehat mempunyai kemampuan belajar lebih baik dan akan tumbuh menjadi dewasa dan lebih terdidik. Menurut Juanita dalam Wahid (2012) dalam keluarga yang sehat, pendidikan anak cenderung tidak terputus jika dibandingkan dengan keluarga yang tidak sehat. Sedangkan pada tingkat makro, penduduk dengan kesehatan yang baik merupakan salah satu input penting untuk menurunkan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi jangka panjang.

Becker dalam Saputri (2014: 25) menyatakan bahwa salah satu cara untuk berinvestasi dalam *human capital* adalah dengan meningkatkan kesehatan emosional dan fisik. Semakin banyak pemerintah mengeluarkan dana pada sektor kesehatan, maka kemungkinan besar masyarakat akan hidup sehat. Dalam indeks pembangunan manusia juga terdapat indeks kesehatan yang didalamnya terdapat

angka harapan hidup, dimana orang yang memiliki kesehatan yang baik akan memiliki umur panjang yang kemungkinan besar juga dapat mempengaruhi kualitas hidupnya. Permasalahan kesehatan merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap manusia, tanpa kesehatan masyarakat tidak dapat menghasilkan suatu produktivitas bagi negara. Kegiatan ekonomi suatu negara akan berjalan jika ada jaminan kesehatan bagi setiap penduduknya.

Menurut Todaro (2003) pengeluaran pemerintah pada sektor anggaran kesehatan yang dikeluarkan untuk memenuhi salah satu hak dasar untuk memperoleh pelayanan Kesehatan berupa fasilitas dan pelayanan kesehatan merupakan prasyarat bagi peningkatan produktivitas masyarakat. Dengan demikian kesehatan turut serta membantu peningkatan pembangunan manusia, karena manusia yang sehat akan jauh lebih baik daripada manusia yang kurang sehat. Kesehatan yang baik akan berpengaruh pada perubahan yang baik, sebaliknya kesehatan yang buruk atau kurang baik akan berakibat pada perubahan ke arah yang kurang baik juga tentunya. Karena Tanpa kesehatan masyarakat tidak akan memiliki semangat serta produktivitas.

## **2.6 Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang dilakukan oleh Widodo *et.al.*, (2011) adalah untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan terhadap pengentasan kemiskinan melalui peningkatan pembangunan manusia di Provinsi Jawa Tengah. Data diperoleh BPS dari Provinsi Jawa Tengah, Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Jawa Tengah, Indikator Utama Sosial Politik dan Keamanan Provinsi Jawa Tengah. Studi ini menggunakan Analisis Regresi Berganda (*Multiple Regression Analysis*) untuk menganalisis data. Hasil studi menunjukkan bahwa alokasi pengeluaran pemerintah sektor publik tidak secara langsung mempengaruhi IPM ataupun kemiskinan, namun secara bersama-sama (simultan) pengeluaran sektor publik dan IPM dapat mempengaruhi kemiskinan. Hal tersebut berarti bahwa pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan tidak bisa berdiri sendiri sebagai variabel independen dalam mempengaruhi kemiskinan, namun harus berinteraksi dengan variabel lain

(variabel IPM). Sehingga implikasi dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan akan dapat mempengaruhi kemiskinan jika pengeluaran tersebut dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas pembangunan manusia.

Selanjutnya Kahang *et.al.*, (2016) tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di kabupaten Kutai Timur. Jenis data pada penelitian menggunakan data sekunder adalah data yangtelah tersedia untuk instansi pemerintah yang terlibat dalam masa studi 2009-2014. analisis model dalam penelitian ini dan Program regresi linier berganda digunakan untuk mengolah data uji asumsi klasik dengan menggunakan SPSS 22. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia, dimana setiap terjadi perubahan pada Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan maka, akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kutai Timur. pengeluaran pemerintah sektor kesehatan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia, dimana setiap terjadi perubahan pada pengeluaran pemerintah sektor kesehatan tidak meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kutai Timur.

Selanjutnya penelitian dari Palenewen *et.al.*, (2018) bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder pada tahun 2008-2017. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi sederhana dan regresi berganda. Perangkat lunak yang digunakan untuk melakukan analisis adalah eviews8. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh positif dan tidak signifikan, sedangkan pada sektor kesehatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM. Variabel IPM berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan. Variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh

positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan untuk sektor kesehatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.

Selanjutnya Arifin *et.al.*, (2015) melakukan studi untuk mengetahui besarnya pengaruh pengeluaran pemerintah sektor kesehatan, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Timur tahun 2006-2013. Model analisis data yang digunakan untuk mengetahui hubungan antar variabel digunakan analisis data panel menggunakan pendekatan *fixed effect*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pengeluaran pemerintah sektor kesehatan dan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia Jawa Timur tahun 2006-2013 sedangkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia Jawa Timur tahun 2006-2013.

Selanjutnya penelitian Pake *et.al.*, (2018) untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah pada bidang pendidikan dan kesehatan. Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder adalah data yang telah tersedia pada instansi pemerintah yang terlibat pada tahun 2007-2016. Model analisis yang digunakan adalah model analisis regresi linier berganda dengan bantuan program SPSSV.17. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah pada bidang pendidikan memiliki tanda positif namun kurang berpengaruh secara signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Halmahera Utara. Pengeluaran pemerintah pada bidang kesehatan memiliki tanda positif dan berpengaruh secara signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Halmahera Utara. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa secara bersama-sama pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan dan kesehatan bertanda positif dan berpengaruh secara signifikan.

Temuan dari penelitian Agustina *et.al.*, (2016) bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan terhadap PDRB dan Indeks pembangunan manusia di Provinsi Kalimantan Timur. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder



pada tahun 2004-2013. Alatanalisis yang digunakan adalah analisis jalur (path analisis). Perangkat lunak yang digunakan untuk melakukan analisis adalah IBM SPSS Versi 17.00. Hasil analisis menunjukkan bahwa koefisien jalur antara (Y) 1,150, jalur ini berpengaruh signifikan karena nilai thitung sebesar 4,291 sementara ttabel sebesar 2,446 ( $t_{hitung} = 4,291 > t_{tabel} = 2,446$ ), dengan demikian pada pola hubungan langsung ini, PDRB berpengaruh positif signifikan terhadap IPM, yang didukung oleh Probability Value (sig)  $0,004 > 0,050$ . Hasil Analisis Uji pengaruh tidak langsung, didapat Pengaruh Alokasi Anggaran Bidang pendidikan (X1) terhadap IPM (Y2) melalui PDRB (Y1) sebesar 0,19205 (positif). Hasil Analisis Uji pengaruh tidak langsung, didapat Pengaruh Alokasi Anggaran Bidang Kesehatan (X2) terhadap IPM (Y2) melalui PDRB (Y1) sebesar 0,93725.

Selanjutnya penelitian Hakim dan Sukmana (2017) bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis peran pemerintah yang tercermin dari pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di 16 Negara OKI. Data yang digunakan dalam penelitian ini data sekunder berupa data panel yang dilakukan pada 16 negara OKI dalam kurun waktu 2008 s/d 2011 yang kemudian dianalisis dengan alat analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan memiliki pengaruh negative tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di 16 Negara OKI.

Selanjutnya penelitian Dianaputra dan Aswitari (2017) bertujuan untuk menganalisis pengaruh pembiayaan pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan terhadap indeks kualitas manusia serta pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini dilakukan di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, sedangkan metode analisis yang digunakan yaitu analisis jalur atau *path analysis*. Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa pembiayaan pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks kualitas manusia. Pembiayaan

pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Indeks kualitas manusia memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pembiayaan pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan memiliki pengaruh tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi melalui indeks kualitas manusia. Pengaruh tidak langsung tersebut ditunjukkan dengan variabel indeks kualitas manusia merupakan sebagai variabel intervening.

Mahulauw *et.al.*, (2016) melakukan studi dengan tujuan ingin melihat bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur terhadap peningkatan IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku. Metode penelitian menggunakan analisis jalur (Path Analysis) dengan kriteria pengujian pada tingkat kesalahan 5% untuk melihat pengeluaran Pemerintah Provinsi Maluku di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan juga pendapatan per kapita sebagai variabel intervening. Hasil analisis menunjukkan secara simultan bahwa ketiga jenis pengeluaran pemerintah tersebut berpengaruh signifikan terhadap IPM. Ditemukan bahwa dengan R Square 68.1% dan 31.9% dijelaskan oleh variabel lain di luar model dan secara parsial pendapatan per kapita sebagai variabel intervening tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan IPM.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Jawa Timur tahun 2010-2019. Hal ini ditunjukkan dari nilai  $t_{hitung}$  lebih besar dari nilai  $t_{tabel}$  ( $11.55544 > 2,326$ ). Dengan demikian peningkatan alokasi belanja untuk pendidikan dapat mendorong kualitas sumber daya manusia yang tercermin pada peningkatan IPM.
2. Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Jawa Timur tahun 2010-2019. Hal ini ditunjukkan dari nilai  $t_{hitung}$  lebih besar dari nilai  $t_{tabel}$  ( $18.61248 > 2,326$ ). Hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi alokasi belanja untuk sektor kesehatan maka dapat mendorong kualitas sumber daya manusia yang tercermin pada peningkatan IPM.

## 5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh, maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut.

1. Pemerintah Daerah Jatim diharapkan selalu berupaya mempertahankan dan meningkatkan anggaran pendidikan. Hal tersebut diharapkan mampu menyelesaikan masalah dibidang pendidikan misalnya, menambah fasilitas dan mempermudah akses pendidikan. Sehingga indeks pembangunan manusia terus meningkat.
2. Pemerintah Daerah Jatim terus mempertahankan dan meningkatkan anggaran kesehatan. Anggaran yang dialokasikan untuk sektor kesehatan ini diharapkan dapat menggalakan hidup bersih, peningkatan jumlah tenaga kesehatan, serta bantuan pengobatan atau subsidi terutama obat-obatan generik untuk masyarakat kurang mampu. Sehingga pada akhirnya derajat kesehatan masyarakat akan meningkat lagi dan tercermin pada peningkatan indeks pembangunan manusia.
3. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel-variabel yang lain misalnya kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi agar dapat mengetahui apa pengaruh dan bagaimana pengaruhnya terhadap indeks pembangunan manusia, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan pengeluaran pemerintah sektor kesehatan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, E., Rochaida, E., dan Ulfah, Y., (2016), “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Serta Indeks Pembangunan Manusia di Kalimantan Timur”, *Jurnal Ekonomi Keuangan, dan Manajemen*, Vol. 12 No. 2, hal. 192-217
- Arifin, M.Y., Suswandi, P.E., dan Adenan, M., (2015), “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia Jawa Timur 2006-2013”, *Artikel Ilmiah Mahasiswa 2015*, hal. 1-8
- Astri, M., (2012), “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah Pada Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia”, *Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Bisnis*, Vol.1 No. 1 Tahun 2012
- Badan Pusat Statistik (2019), *Data dan Informasi Indeks Pembangunan Manusia*
- Dianaputra, I.G.K.A ., dan Aswitari, L.P., (2017), “Pengaruh Pembiayaan Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Kualitas Manusia Serta Pertumbuhan Ekonomi Pada Kabupaten/Kota Provinsi Bali Tahun 2011-2015”, *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, Vol.6, No 3, Maret 2017, hal. 286-311
- Ferdinand, A., (2006), *Metode Penelitian Manajemen*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, D.N., (2003), *Basic Econometrics*, 4<sup>th</sup> Edition, McGraw-Hill International Edition, Singapore.
- Gujarati, D.N., dan Porter, D.C., (2010), *Dasar-dasar Ekonometrika*, Edisi 5 Buku 1, Jakarta: Salemba Empat.

- Gujarati, D.N., dan Porter, D.C., (2012), *Dasar-dasar Ekonometrika Buku 2*. Edisi 5. Raden Carlos Mangunsong (penj.). Jakarta: Salemba Empat.
- Hakim, A.A.A.A., dan Sukmana, R., (2017), “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di 16 Negara Organisasi Konferensi Islam (OKI)”, *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 2 No. 1, Juni 2017, hal. 67-91
- Kahang, M., Saleh, M., dan Suharto, R.B., (2016), “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kutai Timur”, *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, Vol. 18 No. 2, hal. 130-140.
- Kuncoro, M., (2003), *Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Mahulauw, A.K., Santosa, D.B., dan Mahardika, P., (2016), “Pengaruh Pengeluaran Kesehatan dan Pendidikan Serta Infrastruktur Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Maluku”, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol.14, No.02 Desember 2016, hal. 122-148
- Mirza., dan Danni, S., (2012), “Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah Tahun 2006-2009”, *Economics Development Analysis Journal*.
- Nyoman, I.D., (2014), *Penilaian Status Gizi*. Jakarta: Penerbit EGC.
- Pake, S.D.S., Kawung, G.M.V., dan Luntungan, A.Y., (2018), “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Bidang Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Halmahera Utara”, *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol. 18 No. 04 Tahun 2018, hal. 13-22.
- Patta, D., (2012), “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Selatan Periode 2001-2010”, FE Universitas Hasanuddin. Makassar.

- Palenewen, T.O.M., Walewangko, E.N., dan Sumual, J.I., (2018), “ Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Sektor Kesehatan Terhadap IPM dan Dampaknya Terhadap Kemiskinan di Sulawesi Utara”, *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol. 18 No. 04 Tahun 2018, hal. 52-61.
- Pratowo, N.I., (2013), “Analisis Faktor Faktor yang Berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia”, *Jurnal Studi Ekonomi Indonesia*. Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.
- Ranis, G., Ramirez, A., and Stewart, F., (1998), “Economic Growth and Human Capital”, *QEH Working Paper. No. 18*.
- Saputri, R.F., (2014), “Analisis Pengaruh Investasi Sumber Daya Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Tengah”, *Skripsi*. Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Sekaran, U., dan Bougie, R., (2013), *Metode Penelitian untuk Bisnis Pendekatan Pengembangan-Keahlian*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono., (2010), *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono., (2012), *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, E., (2010), *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung Refika Aditama.
- Syam, S. F., (2014), “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan, Kesehatan dan IPM terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan”, *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C., (2003), *Economic Development, Eighth Edition*. PT. Gelora Aksara Pratama, Jakarta.
- Todaro, M.P., dan Smith, S.C., (2006), *Pembangunan Ekonomi*. Edisi ke 9. Jakarta: Erlangga.

- Trimaryani, (2011), “Analisis Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Jawa Tengah”, *thesis*, UPN "Veteran" Yogyakarta.
- Usmaliadanti, C., (2011), “Analisis Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2009”, *Skripsi*, FE UNDIP.
- Wahid, B. A., (2012), “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Melalui Pertumbuhan Ekonomi”. Makassar.
- Widodo., Waridin., dan Maria J.K., (2011), “Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Pengentasan Kemiskinan Melalui Peningkatan Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah”, *Jurnal DinamikaEkonomi Pembangunan*, Vol. 1 No. 1, Juli 2011, hal. 25-42
- Winarti, A., (2014), “Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, Kemiskinan dan PDB Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia Periode 1992-2012”, *Skripsi*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Zulyanto, A., (2016), “Pengeluaran Pemerintah Dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Provinsi Bengkulu”, *Jurnal Ekonomi-Qu (Jurnal Ilmu Ekonomi)*, Vol. 6, No. 2, Oktober 2016, Hal. 115-139.



**LAMPIRAN**

**LAMPIRAN 1**

**DATA PENELITIAN**

No	Kabupaten	Tahun	IPM	Kesehatan	Pendidikan
1	Kabupaten Pacitan	2010	61.14	2,73%	7,08%
		2011	62.03	3,56%	8,52%
		2012	62.94	4,66%	9,26%
		2013	63.38	8,46%	15,27%
		2014	63.81	12,26%	21,27%
		2015	64.92	1,80%	0,58%
		2016	65.74	6,14%	6,43%
		2017	66.51	10,42%	10,42%
		2018	67.33	24,99%	10,59%
		2019	68.16	24,99%	10,59%
2	Kabupaten Ponorogo	2010	64.13	6,19%	9,09%
		2011	65.28	6,08%	10,95%
		2012	66.16	8,64%	12,16%
		2013	67.03	10,02%	13,28%
		2014	67.40	11,39%	14,41%
		2015	68.16	3,16%	0,34%
		2016	68.93	3,41%	1,99%
		2017	69.26	16,72%	12,51%
		2018	69.91	17,19%	12,63%
		2019	70.56	17,19%	12,63%
3	Kabupaten Trenggalek	2010	63.67	4,44%	7,41%
		2011	64.27	5,08%	8,88%
		2012	65.01	6,01%	9,94%
		2013	65.76	6,92%	10,86%
		2014	66.16	7,84%	11,77%
		2015	67.25	3,47%	0,88%
		2016	67.78	13,44%	11,51%
		2017	68.10	15,75%	15,67%
		2018	68.71	18,53%	11,53%
		2019	69.46	18,53%	11,53%
4	Kabupaten Tulungagung	2010	67.28	6,32%	9,39%
		2011	67.76	8,24%	12,08%
		2012	68.29	10,38%	14,18%

		2013	69.30	7,24%	9,37%
		2014	69.49	4,10%	4,55%
		2015	70.07	2,21%	0,41%
		2016	70.82	18,26%	16,42%
		2017	71.24	13,67%	11,40%
		2018	71.99	14,79%	11,10%
		2019	72.62	14,79%	11,10%
5	Kabupaten Blitar	2010	64.79	5,36%	8,72%
		2011	65.47	5,45%	9,54%
		2012	66.17	6,70%	11,56%
		2013	66.49	3,35%	5,78%
		2014	66.88	3,65%	10,76%
		2015	68.13	3,95%	0,54%
		2016	68.88	17,16%	13,49%
		2017	69.33	16,74%	13,36%
		2018	69.93	18,82%	13,13%
		2019	70.57	18,82%	13,13%
6	Kabupaten Kediri	2010	66.24	4,97%	7,35%
		2011	66.84	7,01%	10,05%
		2012	67.29	5,86%	11,08%
		2013	68.01	7,45%	11,61%
		2014	68.44	9,04%	12,13%
		2015	68.91	2,11%	0,25%
		2016	69.87	7,72%	8,82%
		2017	70.47	19,93%	13,16%
		2018	71.07	17,96%	12,77%
		2019	71.85	17,96%	12,77%
7	Kabupaten Malang	2010	63.47	2,21%	20,05%
		2011	63.97	2,52%	22,28%
		2012	64.71	7,62%	28,94%
		2013	65.20	9,04%	36,98%
		2014	65.59	10,47%	45,02%
		2015	66.63	4,29%	0,57%
		2016	67.51	18,48%	44,61%
		2017	68.47	18,30%	49,10%
		2018	69.40	18,05%	47,17%
		2019	70.35	18,05%	47,17%
8	Kabupaten Lumajang	2010	59.62	11,08%	17,67%
		2011	60.72	7,71%	10,95%
		2012	61.31	7,30%	10,58%
		2013	61.87	3,65%	5,29%

		2014	62.33	4,26%	14,02%
		2015	63.02	4,87%	2,34%
		2016	63.74	4,62%	1,51%
		2017	64.23	16,13%	9,75%
		2018	64.83	20,20%	13,94%
		2019	65.33	20,20%	13,94%
9	Kabupaten Jember	2010	59.94	4,92%	7,83%
		2011	60.64	5,64%	9,81%
		2012	61.31	7,27%	11,67%
		2013	62.43	8,84%	12,56%
		2014	62.64	10,41%	13,45%
		2015	63.04	1,82%	0,74%
		2016	64.01	3,43%	2,38%
		2017	64.96	18,84%	15,11%
		2018	65.96	19,41%	13,22%
		2019	66.69	19,41%	13,22%
10	Kabupaten Banyuwangi	2010	64.54	2,65%	3,28%
		2011	65.48	3,33%	5,71%
		2012	66.12	5,44%	9,00%
		2013	66.74	7,04%	10,46%
		2014	67.31	8,64%	11,92%
		2015	68.08	11,75%	12,46%
		2016	69	14,86%	12,99%
		2017	69.64	14,92%	10,60%
		2018	70.06	15,68%	11,79%
		2019	70.60	15,68%	11,79%
11	Kabupaten Bondowoso	2010	59.47	4,96%	7,15%
		2011	60.46	6,52%	9,25%
		2012	62.24	7,02%	10,32%
		2013	63.21	8,03%	10,91%
		2014	63.43	9,05%	11,49%
		2015	63.95	3,94%	0,44%
		2016	64.52	14,49%	14,29%
		2017	64.75	13,51%	11,88%
		2018	65.27	16,24%	12,14%
		2019	66.09	16,24%	12,14%
12	Kabupaten Situbondo	2010	60.07	3,83%	6,91%
		2011	60.82	5,32%	8,72%
		2012	62.23	5,83%	9,48%
		2013	63.43	7,90%	10,79%
		2014	63.91	9,97%	12,11%

		2015	64.53	5,12%	0,94%
		2016	65.08	14,52%	12,54%
		2017	65.68	15,04%	14,83%
		2018	66.42	16,23%	15,79%
		2019	67.09	16,23%	7,89%
13	Kabupaten Probolinggo	2010	59.83	7,07%	13,87%
		2011	60.30	7,07%	9,24%
		2012	61.33	8,17%	11,46%
		2013	62.61	4,08%	5,73%
		2014	63.04	4,73%	13,87%
		2015	63.83	5,39%	1,07%
		2016	64.12	18,81%	12,65%
		2017	64.28	14,86%	10,65%
		2018	64.85	14,91%	10,73%
		2019	65.60	14,91%	10,73%
14	Kabupaten Pasuruan	2010	60.79	5,13%	7,81%
		2011	61.43	5,79%	9,43%
		2012	62.31	6,46%	11,05%
		2013	63.74	8,45%	11,82%
		2014	64.35	10,43%	12,59%
		2015	65.04	3,92%	1,01%
		2016	65.71	21,50%	13,24%
		2017	66.69	12,08%	11,22%
		2018	67.41	13,12%	10,91%
		2019	68.29	13,12%	10,91%
15	Kabupaten Sidoarjo	2010	73.75	7,53%	10,38%
		2011	74.48	7,94%	12,59%
		2012	75.14	7,16%	1,86%
		2013	76.39	10,99%	9,55%
		2014	76.78	14,82%	17,23%
		2015	77.43	3,68%	1,00%
		2016	78.17	21,38%	18,39%
		2017	78.70	8,52%	9,37%
		2018	79.50	8,99%	9,81%
		2019	80.05	8,99%	9,81%
16	Kabupaten Mojokerto	2010	68.14	4,24%	7,89%
		2011	68.71	4,21%	9,90%
		2012	69.17	4,26%	10,20%
		2013	69.84	2,13%	5,10%
		2014	70.22	8,52%	13,30%
		2015	70.85	3,64%	1,14%

		2016	71.38	14,60%	13,15%
		2017	72.36	15,92%	13,09%
		2018	72.64	21,23%	13,12%
		2019	73.53	21,23%	13,12%
17	Kabupaten Jombang	2010	66.20	5,33%	7,37%
		2011	66.84	5,63%	8,77%
		2012	67.82	7,01%	10,41%
		2013	68.63	8,17%	11,24%
		2014	69.07	9,33%	12,07%
		2015	69.59	3,10%	1,54%
		2016	70.03	14,48%	12,53%
		2017	70.88	15,75%	12,16%
		2018	71.86	15,59%	11,95%
		2019	72.85	15,59%	11,95%
18	Kabupaten Nganjuk	2010	65.60	4,87%	7,36%
		2011	66.58	5,18%	9,24%
		2012	68.07	6,63%	10,40%
		2013	68.98	8,47%	11,48%
		2014	69.59	10,30%	12,55%
		2015	69.90	2,94%	0,72%
		2016	70.50	14,64%	12,55%
		2017	70.69	15,06%	11,83%
		2018	71.23	15,96%	11,94%
		2019	71.71	15,96%	11,94%
19	Kabupaten Madiun	2010	64.87	5,09%	8,24%
		2011	65.98	6,59%	9,88%
		2012	67.32	7,05%	11,46%
		2013	68.07	9,24%	12,55%
		2014	68.60	11,44%	13,65%
		2015	69.39	5,72%	0,59%
		2016	69.67	2,98%	2,23%
		2017	70.27	16,29%	14,11%
		2018	71.01	17,81%	13,65%
		2019	71.69	17,81%	13,65%
20	Kabupaten Magetan	2010	67.58	6,31%	8,56%
		2011	68.52	7,32%	10,35%
		2012	69.56	8,54%	11,91%
		2013	69.86	9,93%	12,96%
		2014	70.29	11,33%	14,00%
		2015	71.39	2,57%	0,45%
		2016	71.94	4,42%	1,90%

		2017	72.60	15,32%	13,39%
		2018	72.91	17,14%	13,24%
		2019	73.49	17,14%	13,24%
21	Kabupaten Ngawi	2010	64.52	2,50%	4,76%
		2011	65.84	3,47%	6,25%
		2012	66.72	3,11%	6,53%
		2013	67.25	1,56%	3,27%
		2014	67.78	5,39%	7,59%
		2015	68.32	0,91%	0,26%
		2016	68.96	4,09%	3,53%
		2017	69.27	7,28%	6,80%
		2018	69.91	35,84%	30,50%
		2019	70.41	35,84%	30,50%
22	Kabupaten Bojonegoro	2010	62.19	5,49%	8,12%
		2011	63.22	4,30%	9,71%
		2012	64.20	5,76%	11,73%
		2013	64.85	8,73%	13,51%
		2014	65.27	11,70%	15,28%
		2015	66.17	3,85%	0,63%
		2016	66.73	1,45%	0,93%
		2017	67.28	17,41%	13,50%
		2018	67.85	20,66%	13,29%
		2019	68.75	20,66%	13,29%
23	Kabupaten Tuban	2010	61.33	5,02%	8,38%
		2011	62.47	5,02%	8,38%
		2012	63.36	5,99%	8,88%
		2013	64.14	7,10%	9,93%
		2014	64.58	8,21%	10,99%
		2015	65.52	2,76%	1,13%
		2016	66.19	12,13%	11,21%
		2017	66.77	17,05%	13,81%
		2018	67.43	18,36%	13,64%
		2019	68.37	18,36%	13,64%
24	Kabupaten Lamongan	2010	65.40	5,21%	6,79%
		2011	66.21	6,27%	8,83%
		2012	67.51	7,13%	10,26%
		2013	68.90	8,06%	14,83%
		2014	69.42	8,99%	19,41%
		2015	69.84	2,42%	0,41%
		2016	70.34	2,67%	1,61%
		2017	71.11	18,25%	12,33%

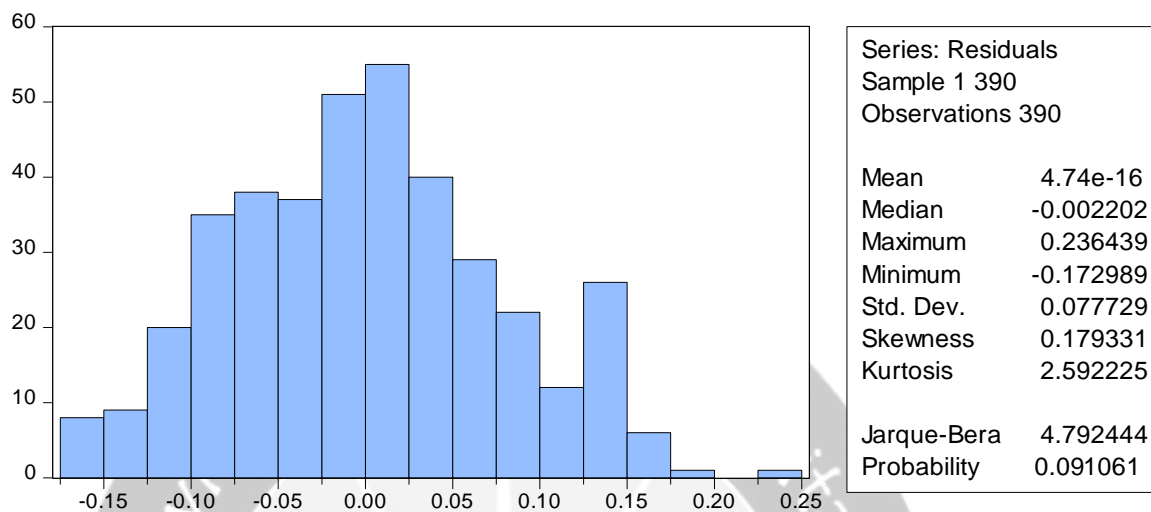
		2018	71.97	20,49%	12,77%
		2019	72.57	20,49%	12,77%
25	Kabupaten Gresik	2010	69.90	3,10%	7,24%
		2011	71.11	5,09%	8,48%
		2012	72.12	7,08%	9,72%
		2013	72.47	9,35%	10,38%
		2014	72.84	11,62%	11,05%
		2015	73.57	0,34%	0,20%
		2016	74.46	15,11%	11,75%
		2017	74.84	15,76%	13,63%
		2018	75.28	16,28%	13,77%
		2019	76.10	16,28%	13,77%
26	Kabupaten Bangkalan	2010	57.23	5,38%	8,21%
		2011	58.63	6,66%	10,54%
		2012	59.65	7,94%	12,86%
		2013	60.19	8,08%	8,75%
		2014	60.71	8,22%	4,64%
		2015	61.49	0,65%	0,39%
		2016	62.06	9,09%	8,04%
		2017	62.30	17,53%	15,70%
		2018	62.87	18,22%	15,43%
		2019	63.79	18,22%	15,43%
27	Kabupaten Sampang	2010	54.49	1,37%	4,48%
		2011	55.17	1,37%	4,48%
		2012	55.78	3,07%	6,48%
		2013	56.45	4,12%	6,73%
		2014	56.98	5,18%	6,98%
		2015	58.18	2,03%	0,94%
		2016	59.09	8,41%	7,99%
		2017	59.90	24,51%	20,92%
		2018	61	24,97%	20,50%
		2019	61.94	24,97%	20,50%
28	Kabupaten Pamekasan	2010	59.37	3,59%	5,00%
		2011	60.42	4,00%	6,65%
		2012	61.21	5,21%	8,30%
		2013	62.27	5,81%	8,75%
		2014	62.66	6,40%	9,21%
		2015	63.10	8,76%	9,57%
		2016	63.98	11,13%	9,94%
		2017	64.93	19,41%	14,19%
		2018	65.41	17,84%	14,19%

		2019	65.94	17,84%	14,19%
29	Kabupaten Sumenep	2010	57.27	1,19%	2,16%
		2011	58.70	1,19%	2,16%
		2012	60.08	1,62%	2,46%
		2013	60.84	27,41%	28,24%
		2014	61.43	53,20%	54,02%
		2015	62.38	0,35%	0,11%
		2016	63.42	4,15%	2,72%
		2017	64.28	3,51%	2,78%
		2018	65.25	3,69%	2,68%
		2019	66.22	3,69%	2,68%
30	Kota Kediri	2010	72.20	8,09%	6,93%
		2011	72.93	9,72%	7,78%
		2012	73.66	11,36%	8,63%
		2013	74.18	5,68%	4,31%
		2014	74.62	10,15%	21,41%
		2015	75.67	10,15%	21,41%
		2016	76.33	3,39%	1,88%
		2017	77.13	13,90%	9,51%
		2018	77.58	13,79%	9,07%
		2019	78.08	13,79%	9,07%
31	Kota Blitar	2010	72.56	7,26%	7,48%
		2011	73.08	7,38%	9,70%
		2012	73.53	6,51%	10,41%
		2013	74.53	6,41%	9,65%
		2014	75.26	6,30%	8,88%
		2015	76	5,56%	4,94%
		2016	76.71	14,22%	13,66%
		2017	77.10	14,59%	12,31%
		2018	77.58	15,88%	11,49%
		2019	78.56	15,88%	11,49%
32	Kota Malang	2010	76.69	4,29%	7,39%
		2011	77.36	6,17%	9,40%
		2012	78.04	6,64%	10,97%
		2013	78.44	3,32%	5,48%
		2014	78.96	15,77%	13,87%
		2015	80.05	5,30%	1,20%
		2016	80.46	12,91%	12,74%
		2017	80.65	14,33%	12,29%
		2018	80.89	15,63%	13,33%
		2019	81.32	15,63%	13,33%



33	Kota Probolinggo	2010	67.30	4,67%	8,18%
		2011	68.14	6,26%	9,33%
		2012	68.93	6,92%	10,59%
		2013	70.05	8,93%	11,42%
		2014	70.49	10,93%	12,25%
		2015	71.01	3,92%	3,52%
		2016	71.50	9,10%	11,04%
		2017	72.09	18,51%	11,35%
		2018	72.53	15,37%	11,16%
		2019	73.27	15,37%	11,16%
34	Kota Pasuruan	2010	69.69	3,81%	7,22%
		2011	70.41	4,40%	7,19%
		2012	72.01	5,65%	7,80%
		2013	72.89	2,82%	3,90%
		2014	73.23	15,31%	33,49%
		2015	73.78	15,10%	2,35%
		2016	74.11	13,10%	9,36%
		2017	74.39	14,63%	9,27%
		2018	74.78	12,59%	9,71%
		2019	75.25	12,59%	9,71%
35	Kota Mojokerto	2010	72.78	7,94%	5,35%
		2011	73.47	5,12%	6,46%
		2012	74.20	10,30%	7,05%
		2013	74.91	5,15%	3,53%
		2014	75.04	13,72%	41,75%
		2015	75.54	4,20%	2,65%
		2016	76.38	3,04%	2,28%
		2017	76.77	16,30%	9,19%
		2018	77.14	17,12%	10,87%
		2019	77.96	17,12%	10,87%
36	Kota Madiun	2010	75.98	4,28%	7,93%
		2011	76.48	5,01%	8,50%
		2012	77.21	5,46%	9,73%
		2013	78.41	2,73%	4,86%
		2014	78.81	15,18%	25,55%
		2015	79.48	3,20%	2,63%
		2016	80.01	14,71%	14,09%
		2017	80.13	14,67%	10,66%
		2018	80.33	17,37%	8,02%
		2019	80.88	17,37%	8,02%
37	Kota Surabaya	2010	77.20	4,60%	5,20%

		2011	77.62	6,37%	8,90%
		2012	78.05	8,65%	8,87%
		2013	78.51	9,30%	10,37%
		2014	78.87	9,94%	11,86%
		2015	79.47	0,61%	0,12%
		2016	80.38	12,98%	12,89%
		2017	81.07	15,03%	13,42%
		2018	81.74	16,26%	14,18%
		2019	82.22	16,26%	14,18%
38	Kota Batu	2010	68.66	6,37%	7,17%
		2011	69.76	6,64%	7,89%
		2012	70.62	6,08%	8,21%
		2013	71.55	7,92%	9,22%
		2014	71.89	9,75%	10,24%
		2015	72.62	8,31%	1,13%
		2016	73.57	12,38%	12,69%
		2017	74.26	13,20%	13,65%
		2018	75.04	14,68%	14,90%
		2019	75.88	14,68%	14,90%
39	Prov. Jawa Timur	2010	65.36	6,54%	1,00%
		2011	66.06	6,84%	1,21%
		2012	66.74	8,36%	1,30%
		2013	67.55	9,47%	1,45%
		2014	68.14	10,58%	1,60%
		2015	68.95	1,45%	0,88%
		2016	69.74	13,49%	0,78%
		2017	70.27	14,79%	30,90%
		2018	70.77	14,24%	30,44%
		2019	71.50	14,24%	30,44%

**LAMPIRAN 2****HASIL UJI NORMALITAS**

## LAMPIRAN 3

### HASIL UJI MULTIKOLINERITAS

Variance Inflation Factors  
Date: 10/13/20 Time: 09:18  
Sample: 1 390  
Included observations: 390

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0.927111	12.74413	NA
LNKESEHATAN	0.273926	26.15020	2.059279
LNPENDIDIKAN	0.155165	15.99723	2.059279



**LAMPIRAN 4**  
**HASIL UJI HETEROSKEDASTISITAS**

Heteroskedasticity Test: Glejser

F-statistic	0.221876	Prob. F(2,387)	0.8011
Obs*R-squared	0.446680	Prob. Chi-Square(2)	0.7998
Scaled explained SS	0.433279	Prob. Chi-Square(2)	0.8052

Test Equation:

Dependent Variable: ARESID

Method: Least Squares

Date: 10/13/20 Time: 09:18

Sample: 1 390

Included observations: 390

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.966794	0.573536	6.916386	0.0000
LNKESEHATAN	-0.013958	0.311753	-0.044772	0.9643
LNPENDIDIKAN	-0.101138	0.234634	-0.431047	0.6667
R-squared	0.001145	Mean dependent var		4.260640
Adjusted R-squared	-0.004017	S.D. dependent var		3.166410
S.E. of regression	3.172763	Akaike info criterion		5.154745
Sum squared resid	3895.706	Schwarz criterion		5.185254
Log likelihood	-1002.175	Hannan-Quinn criter.		5.166839
F-statistic	0.221876	Durbin-Watson stat		0.335395
Prob(F-statistic)	0.801117			

**LAMPIRAN 5**  
**HASIL UJI AUTOKORELASI**

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	7.725351	Prob. F(340,47)	0.0000
Obs*R-squared	383.1441	Prob. Chi-Square(340)	0.0532



**LAMPIRAN 6**  
**HASIL OUTPUT PEMILIHAN MODEL PANEL**

**Common Effect**

Dependent Variable: IPM  
Method: Panel Least Squares  
Date: 10/13/20 Time: 09:14  
Sample: 2010 2019  
Periods included: 10  
Cross-sections included: 39  
Total panel (balanced) observations: 390

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	73.60147	0.962866	76.44001	0.0000
LNPENDIDIKAN	3.570906	0.593910	3.987983	0.0001
LNKESEHATAN	3.525766	0.523379	6.736541	0.0000
R-squared	0.107979	Mean dependent var		68.69905
Adjusted R-squared	0.103369	S.D. dependent var		5.625176
S.E. of regression	5.326513	Akaike info criterion		6.190933
Sum squared resid	10979.86	Schwarz criterion		6.221442
Log likelihood	1204.232	Hannan-Quinn criter.		6.203027
F-statistic	23.42315	Durbin-Watson stat		0.094529
Prob(F-statistic)	0.000000			

## LAMPIRAN 7

### HASIL OUTPUT PEMILIHAN MODEL PANEL

#### Fixed Effect

Dependent Variable: IPM  
 Method: Panel Least Squares  
 Date: 10/13/20 Time: 09:14  
 Sample: 2010 2019  
 Periods included: 10  
 Cross-sections included: 39  
 Total panel (balanced) observations: 390

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	72.45200	0.274285	264.1485	0.0000
LNPENDIDIKAN	2.352931	0.117342	11.52978	0.0000
LNKESEHATAN	2.851032	0.153588	18.56281	0.0000

#### Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.938427	Mean dependent var	68.69905
Adjusted R-squared	0.931370	S.D. dependent var	5.625176
S.E. of regression	1.473646	Akaike info criterion	3.712538
Sum squared resid	757.8995	Schwarz criterion	4.129491
Log likelihood	-682.9448	Hannan-Quinn criter.	3.877820
F-statistic	132.9769	Durbin-Watson stat	0.924771
Prob(F-statistic)	0.000000		



**LAMPIRAN 8**  
**HASIL OUTPUT PEMILIHAN MODEL PANEL**

**Random Effect**

Dependent Variable: IPM  
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)  
Date: 10/13/20 Time: 09:14  
Sample: 2010 2019  
Periods included: 10  
Cross-sections included: 39  
Total panel (balanced) observations: 390  
Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	72.46210	0.863826	83.88503	0.0000
LNPENDIDIKAN	2.355053	0.117265	11.55544	0.0000
LNKESEHATAN	2.857168	0.153508	18.61248	0.0000
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			5.115569	0.9234
Idiosyncratic random			1.473646	0.0766
Weighted Statistics				
R-squared	0.478637	Mean dependent var	6.232401	
Adjusted R-squared	0.475943	S.D. dependent var	2.038143	
S.E. of regression	1.475448	Sum squared resid	842.4784	
F-statistic	177.6429	Durbin-Watson stat	0.835014	
Prob(F-statistic)	0.000000			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.103574	Mean dependent var	68.69905	
Sum squared resid	11034.09	Durbin-Watson stat	0.063755	

**LAMPIRAN 9**  
**HASIL OUTPUT PEMILIHAN MODEL PANEL**

**Uji Chow**

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	123.869541	(38,349)	0.0000
Cross-section Chi-square	1042.574297	38	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: IPM

Method: Panel Least Squares

Date: 10/13/20 Time: 09:14

Sample: 2010 2019

Periods included: 10

Cross-sections included: 39

Total panel (balanced) observations: 390

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	73.60147	0.962866	76.44001	0.0000
LNPENDIDIKAN	3.570906	0.593910	3.987983	0.0001
LNKESEHATAN	3.525766	0.523379	6.736541	0.0000

R-squared	0.107979	Mean dependent var	68.69905
Adjusted R-squared	0.103369	S.D. dependent var	5.625176
S.E. of regression	5.326513	Akaike info criterion	6.190933
Sum squared resid	10979.86	Schwarz criterion	6.221442
Log likelihood	-1204.232	Hannan-Quinn criter.	6.203027
F-statistic	23.42315	Durbin-Watson stat	0.094529
Prob(F-statistic)	0.000000		

**LAMPIRAN 10**  
**HASIL OUTPUT PEMILIHAN MODEL PANEL**

**Uji Hausman Test**

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	2.947157	2	0.2291

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
LNPENDIDIKAN	2.352931	2.355053	0.000018	0.6174
LNKESEHATAN	2.851032	2.857168	0.000025	0.2162

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: IPM

Method: Panel Least Squares

Date: 10/13/20 Time: 09:15

Sample: 2010 2019

Periods included: 10

Cross-sections included: 39

Total panel (balanced) observations: 390

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	72.45200	0.274285	264.1485	0.0000
LNPENDIDIKAN	2.352931	0.117342	11.52978	0.0000
LNKESEHATAN	2.851032	0.153588	18.56281	0.0000

**Effects Specification**

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.938427	Mean dependent var	68.69905
Adjusted R-squared	0.931370	S.D. dependent var	5.625176
S.E. of regression	1.473646	Akaike info criterion	3.712538
Sum squared resid	757.8995	Schwarz criterion	4.129491
Log likelihood	682.9448	Hannan-Quinn criter.	3.877820
F-statistic	132.9769	Durbin-Watson stat	0.924771
Prob(F-statistic)	0.000000		

## **LAMPIRAN 11**

### **DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN**

Provinsi Jawa Timur membentang antara  $111^{\circ} 0' \text{ BT}$  -  $114^{\circ} 4' \text{ BT}$  dan  $7^{\circ} 12' \text{ LS}$  -  $8^{\circ} 48' \text{ LS}$ , dengan ibukota yang terletak di Kota Surabaya. Bagian utara Provinsi Jawa Timur berbatasan dengan Laut Jawa. Bagian selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia, sebelah timur berbatasan dengan Selat Bali, dan daerah Barat berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah. Letak Jawa Timur yang strategis memberikan keuntungan bagi daerah ini karena menjadi penghubung antara wilayah Indonesia bagian barat dengan bagian tengah. Topografi di Provinsi Jawa Timur beragam, ada yang berupa pegunungan, perbukitan, dan kepulauan. Oleh karena itu, wilayah ini memiliki sumber daya pertanian, kelautan, kehutanan, dan pertambangan yang potensial.

Iklim di daerah Jawa Timur termasuk dalam tropis lembab dengan curah hujan rata-rata 2.100 mm setiap tahun. Suhu udara di daerah ini berkisar antara  $18^{\circ}$ - $35^{\circ}$  Celcius. Struktur geologi di Provinsi Jawa Timur didominasi oleh batuan sedimen Alluvium. Batuan hasil gunung berapi juga tersebar di bagian tengah wilayah Jawa Timur sehingga daerah ini relatif subur. Beragam jenis batuan yang tersebar di Jawa Timur menyebabkan besarnya ketersediaan bahan tambang di wilayah ini.

Kondisi sosial di Jawa Timur berkaitan dengan kualitas pendidikan dan kesehatan untuk masyarakat di daerah ini. Jawa Timur merupakan provinsi dengan jumlah perguruan tinggi negeri terbanyak di Indonesia. Kota Surabaya memiliki lima perguruan tinggi negeri, yaitu Universitas Airlangga, Institut

Teknologi Sepuluh Nopember, Universitas Negeri Surabaya, Politeknik Negeri Surabaya dan IAIN Sunan Ampel. Sedangkan di Malang terdapat empat perguruan tinggi negeri. Selain itu masih banyak lagi perguruan tinggi negeri yang tersebar di wilayah Jawa Timur. Banyaknya jumlah perguruan tinggi di Provinsi Jawa Timur diharapkan mampu meningkatkan kualitas pendidikan di wilayah ini.

Kondisi kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain pengetahuan tentang pola hidup sehat, upaya pencegahan dan pengobatan penyakit, ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan yang terjangkau, ketersediaan tenaga medis dan paramedis, apotik dan toko obat, lingkungan hidup, tempat tinggal yang sehat dan bersih, dan lain-lain. Pelayanan kesehatan diberikan oleh Dinas Kesehatan bagi masyarakat di Provinsi Jawa Timur. Pemantauan kesehatan pada anak balita dan anak pra sekolah dilakukan melalui deteksi dini tumbuh kembang. Pemeriksaan tumbuh kembang di Jawa Timur pada tahun 2010 telah dilakukan pada 2.321.542 anak balita dan pra sekolah. Sedangkan pelayanan kesehatan untuk anak usia sekolah difokuskan pada Usaha Kesehatan Sekolah (UKS).

Kualitas kesehatan didukung juga oleh keberadaan sarana kesehatan. Menurut Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 2019, terdapat 10 jenis sarana kesehatan yang ada di Provinsi Jawa Timur, yaitu Rumah Sakit sebanyak 309 unit, Puskesmas sebanyak 950 unit, Puskesmas Pembantu sebanyak 2.273 unit, Puskesmas Keliling sebanyak 1.063, Pondok Kesehatan Desa sebanyak 1.608 unit, Desa Siaga sebanyak 8.501 unit, Posyandu sebanyak 45.603 unit, Pondok Bersalin Desa sebanyak 4.580 unit, Rumah Bersalin sebanyak 236 unit, dan Balai

Pengobatan Klinik 804 unit. Selain itu, kualitas kesehatan untuk masyarakat juga didukung oleh banyaknya tenaga kesehatan di Jawa Timur yang mencapai 64.400 orang.

